

Sosialisasi Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM



Jelang kenaikan harga BBM, diperlukan upaya agar kebijakan tersebut dapat menyebarluas ke masyarakat. Menko Kesra Agung Laksono, Kamis (20/6) dalam Sosialisasi Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM & Program Percepatan & Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) serta Program Khusus lainnya.

“Saat ini terjadi gangguan stabilitas fiskal. Diperlukan langkah “ langkah untuk menyetatkan dan memperkuat struktur keuangan negara. Karena saat ini terjadi gangguan stabilitas fiskal. Nilai subsidi BBM mencapai Rp 250 triliun dengan volume lebih dari 40 juta liter. Padahal, subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran. Pengguna lebih kepada mereka yang tidak berhak mendapatkan subsidi BBM,” ujar Agung Laksono.

Selama ini dengan subsidi BBM, harga BBM Rp 4.500 dari yang seharusnya Rp 9.000 per liter. UU APBNP 2013 menjadi dasar pemerintah menaikkan harga BBM karena di dalamnya terdapat anggaran kompensasi. Pemerintah rencananya menaikkan Premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar dari Rp 4.500 menjadi 5.500 per liter.

Agung Laksono menegaskan subdisi BBM hanya dikurangi sebesar Rp 2.000 per liter. Masyarakat masih tetap mendapatkan subsidi, sehingga tidak benar jika dikatakan subsidi BBM dicabut semuanya. Pengurangan subdisi BBM yang nilainya mencapai lebih dari Rp 250 triliun dilakukan untuk menyetatkan APBN yang mengalami defisit akibat pembengkakan subsidi BBM. Jika tidak dilakukan, pengurangan maka beban APBN akan semakin berat. Untuk mengurangi beban masyarakat, akan diselenggarakan Program Kompensasi yakni P4S terdiri dari Raskin, BSM dan PKH. Sedangkan untuk program khusus lainnya yakni BLSM dan Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan bahwa, program kompensasi juga ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Kementerian PU segera meluncurkan Program Percepatan dan perluasan Pembangunan Infrastruktur senilai Rp 6 triliun. Program tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin akibat

perubahan harga BBM. Infrastruktur tersebut yakni infrastruktur permukiman, penyediaan air minum, sumber daya air.

Ada 5.500 desa yang akan diberikan infrastruktur pedesaan. Sekitar 1.800 kelurahan miskin di perkotaan dalam PNPM Perkotaan. Akan dibangun sistem penyediaan air minum di 1.800 kelurahan yang rawan air. Sebanyak 318 desa nelayan yang akan diberikan infrastruktur penyediaan air minum. Di bidang sumber daya air, akan dibangun irigasi desa di 4.000 desa. Sekitar 9.818 desa miskin yang akan mendapat program pembangunan infrastruktur dasar, jelas Djoko Kirmanto.

Dari program kompensasi infrastruktur dasar akan menyerap sekitar 2,5 juta tenaga kerja. Kemudian, hasil dari pembangunan infrastruktur dasar dapat dinikmati sekitar 33 – 35 juta masyarakat. (ind)

Pusat Komunikasi Publik

200613